

Peningkatan tata kelola keuangan masjid berbasis andorid untuk transparansi dan keberlanjutan

Dhidhin Noer Ady Rahmanto ^{1*}, Ratih Purbowisanti², Ragil Satria Wicaksana³

Afiliasi: ^{1,2,3}Universitas Alma Ata Yogyakarta

Korespondensi Penulis: ^{1*}dhidhin@almaata.ac.id

ABSTRAK

Tata kelola keuangan masjid yang akuntabel menjadi prasyarat kepercayaan jamaah dan keberlanjutan program kemasjidan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan pencatatan kas masih dominan manual, format laporan tidak seragam, pengarsipan bukti transaksi tidak tertib, serta ketergantungan pada satu bendahara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas masjid melalui pendampingan digital menggunakan aplikasi berbasis Android melalui AppSheet yang dilengkapi buku panduan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan: (1) koordinasi dan survei awal, (2) asesmen kebutuhan dan FGD, (3) buku panduan dan pengembangan aplikasi, (4) pelatihan dan praktik input transaksi, (5) pendampingan implementasi dan monitoring, serta (6) evaluasi dan rencana keberlanjutan. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner penerimaan teknologi yang mengukur *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, fasilitas pendukung, pengaruh sosial, kepercayaan & keamanan siber, persepsi transparansi & akuntabilitas, serta *behavioral intention to adopt* aplikasi. Hasil kegiatan menunjukkan mayoritas peserta menerima aplikasi dengan baik karena memudahkan rekap kas dan memperjelas laporan, namun hambatan utama muncul pada peserta usia lanjut yang memiliki keterbatasan literasi digital. Kegiatan merekomendasikan pendampingan berulang (*micro-coaching*), penunjukan PIC ganda (bendahara dan kader administrasi), serta mekanisme backup dan kontrol akses untuk memastikan keberlanjutan. Implikasi kegiatan ini adalah tersedianya model pemberdayaan tata kelola keuangan masjid yang mudah direplikasi melalui pembinaan DMI.

Kata kunci: tata kelola; keuangan; masjid; andorid

ABSTRACT

Accountable mosque financial governance is a prerequisite for congregational trust and sustainable mosque programs. Field practices, however, indicate that cash bookkeeping is largely manual, reporting formats are inconsistent, transaction evidence is not systematically archived, and processes are highly dependent on a single treasurer. This community service program aims to improve transparency and accountability of mosque cash management through digital assistance using an AppSheet-based application supported by a user manual and operational guidance. The implementation employed a Participatory Action Research (PAR) approach with the following stages: (1) coordination and preliminary survey, (2) needs assessment and focus group discussions, (3) Operational design and application development, (4) training and hands-on transaction input, (5) implementation mentoring and monitoring, and (6) evaluation and sustainability planning. Evaluation used a technology acceptance questionnaire measuring perceived usefulness, perceived ease of use, facilitating conditions, social influence, trust & cybersecurity, perceived transparency & accountability, and behavioral intention to adopt the application. The program found that most participants positively accepted the application for simplifying cash recap and clarifying reports; nevertheless, the main barrier was limited digital literacy among older participants. The program recommends repeated micro-coaching, appointing dual PICs (treasurer and admin cadre), and implementing backup and access control mechanisms to ensure sustainability. This program offers a replicable empowerment model for mosque financial governance through DMI facilitation.

Keywords: governance; finance; mosques; andorid

Informasi Artikel: Submit: 06-11-2025 Revisi: 25-11-2025 Diterima: 24-12-2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat ibadah sekaligus simpul layanan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk pengelolaan dana umat yang bersumber dari infak, sedekah, donasi, bantuan program sosial, dan pendapatan kegiatan. Dana tersebut tidak hanya menopang operasional masjid, tetapi juga membiayai program kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan yang dampaknya langsung dirasakan jamaah. Karena itu, tata kelola keuangan masjid menuntut praktik pencatatan yang tertib, pelaporan yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipahami oleh pengurus dan jamaah (Sudaryati et al., 2025). Transparansi yang memadai pada akhirnya menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan, memperkuat legitimasi sosial masjid, dan memastikan keberlanjutan program.

Namun, praktik di banyak masjid tingkat desa/kelurahan masih menunjukkan dominasi pencatatan manual melalui buku kas atau catatan sederhana yang tidak terstandar. Kondisi ini sering menimbulkan masalah berulang: keterlambatan penyusunan laporan, ketidakkonsistenan klasifikasi transaksi, kesulitan rekonsiliasi kas, dan lemahnya pengarsipan bukti transaksi. Dalam situasi tertentu, proses keuangan juga menjadi sangat bergantung pada satu bendahara, sehingga ketika terjadi pergantian kepengurusan atau bendahara berhalangan, data historis dan jejak transaksi sulit ditelusuri. Keterbatasan ini bukan semata persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan kapasitas organisasi komunitas yang bersifat sukarela (voluntary), rotasi pengurus, serta variasi literasi administrasi dan literasi digital.

Di sisi lain, transformasi digital membuka peluang untuk memperbaiki tata kelola keuangan masjid melalui pemanfaatan perangkat mobile yang lebih mudah diakses. Aplikasi berbasis Android dapat membantu pencatatan transaksi dilakukan secara real time, rekap periodik dapat dihasilkan lebih cepat, dan data dapat dipusatkan agar tidak bergantung pada catatan personal Rakhmawati et al., 2015. Walaupun demikian, keberhasilan digitalisasi tidak otomatis terjadi hanya karena aplikasi tersedia. Banyak inisiatif teknologi berhenti pada tahap pelatihan awal karena tidak disertai perubahan proses kerja, pembagian peran yang jelas, serta pendampingan berkelanjutan (Mohamed et al., 2014).. Dalam konteks ini, intervensi yang

efektif perlu menggabungkan penguatan proses), penguatan alat (aplikasi), dan penguatan kapasitas (pelatihan dan pendampingan) secara simultan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bersama mitra Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bantul untuk mendorong standar minimal tata kelola keuangan masjid yang lebih transparan dan akuntabel. Solusi yang dikembangkan menggunakan AppSheet sebagai platform aplikasi yang relatif mudah dikustomisasi dan dapat dijalankan pada gawai Android. Pendekatan ini dipilih agar masjid tidak terbebani oleh kebutuhan pengembangan perangkat lunak yang kompleks, tetapi tetap memperoleh sistem pencatatan yang rapi, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal (kategori transaksi, format rekap, serta pengaturan akses). Yang membedakan kegiatan ini dari pendekatan “sekadar memberi aplikasi” adalah penekanan pada pembentukan kebiasaan kerja baru melalui Operasional, panduan operasional, praktik langsung, serta monitoring implementasi.

Untuk memastikan solusi yang dikembangkan benar-benar diterima dan berpeluang berlanjut, kegiatan ini mengukur penerimaan teknologi menggunakan konstruk yang lazim digunakan dalam literatur adopsi teknologi. Persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan (*perceived usefulness* dan *perceived ease of use*) merupakan faktor kunci dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) yang memengaruhi sikap dan niat penggunaan (Davis, 1989). Selain itu, *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) menekankan peran kondisi fasilitasi dan pengaruh sosial sebagai determinan adopsi, terutama pada konteks organisasi dan komunitas (Venkatesh et al., 2003). Pada sistem yang menyangkut data dan keuangan, dimensi kepercayaan juga krusial karena persepsi risiko dapat menahan penggunaan; integrasi *trust* ke dalam model adopsi telah banyak dibahas dalam konteks sistem digital (Gefen et al., 2003; Pavlou, 2003). Dalam pengabdian ini, dimensi *trust* diperluas dengan menekankan aspek keamanan siber dan kontrol akses yang relevan bagi pengelolaan dana umat.

Kebaruan (*novelty*) kegiatan ini terletak pada upaya menilai penerimaan teknologi pada konteks pengelolaan keuangan masjid secara lebih komprehensif, dengan menambahkan konstruk persepsi transparansi & akuntabilitas sebagai keluaran tata kelola yang diharapkan. Pada lembaga berbasis kepercayaan seperti masjid, peningkatan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya tujuan administratif, tetapi menjadi indikator penting keberhasilan perubahan. Dengan memasukkan konstruk tersebut, evaluasi tidak berhenti pada kepuasan pelatihan,

melainkan menguji apakah solusi digital benar-benar dipersepsikan memperkuat pertanggungjawaban dan keterlacakan transaksi.

Rumusan masalah kegiatan ini adalah: (1) bagaimana merancang pendampingan digital yang sesuai dengan kapasitas takmir masjid; (2) bagaimana tingkat penerimaan pengurus masjid terhadap aplikasi pencatatan berbasis Android melalui AppSheet; dan (3) strategi apa yang paling relevan untuk memitigasi hambatan adopsi akibat kesenjangan literasi digital dan faktor usia. Adapun tujuan kegiatan adalah: (a) menstandarkan pencatatan kas masjid melalui pengelolaan keuangan dan aplikasi; (b) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan; serta (c) memetakan determinan penerimaan dan niat adopsi sebagai dasar strategi keberlanjutan dan replikasi program melalui pembinaan DMI.

METODE PENELITIAN/

Metode pelaksanaan dilakukan secara sistematis dan partisipatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang menempatkan mitra sebagai subjek bersama dalam diagnosis masalah, perancangan solusi, implementasi, hingga refleksi evaluatif.

Lokasi dan Mitra

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bantul dengan mitra utama DMI Kabupaten Bantul dan [jumlah] masjid lokus (diisi sesuai data). Setiap masjid menunjuk minimal 1–2 orang sebagai PIC (bendahara/sekretaris/kader administrasi).

Tahapan Metode Pelaksanaan

1. Koordinasi dan survei awal

Koordinasi dengan DMI untuk penentuan lokus, pemetaan jadwal, dan kesepakatan output , aplikasi, buku panduan, pelatihan, pendampingan).

2. Asesmen kebutuhan dan FGD

Observasi alur kas dan dokumen keuangan; FGD untuk memetakan masalah, menyepakati format laporan minimal (kas awal–masuk–keluar–akhir), kategori transaksi, dan kebutuhan kontrol akses.

3. Perancangan operasional dan pengembangan aplikasi AppSheet

Penyusunan operasional kas masuk-keluar, otorisasi, bukti transaksi, rekap laporan, pengarsipan, backup, dan pergantian pengurus. Pengembangan aplikasi AppSheet berbasis form input kas, kategori transaksi, dan rekap periodik.

4. Pelatihan dan praktik langsung

Pelatihan tata kelola dan praktik penggunaan aplikasi; peserta melakukan simulasi transaksi dan menyusun laporan periodik. Buku panduan pengguna dibagikan (hardcopy/softcopy) berisi langkah-langkah operasional.

5. Pendampingan implementasi, monitoring, dan evaluasi

Pendampingan lapangan/online untuk input transaksi riil, pemecahan masalah (troubleshooting), dan penilaian kepatuhan operasional melalui checklist.

Instrumen dan Variabel Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner pasca pelaksanaan (skala Likert 1–5) untuk mengukur:

1. Perceived Usefulness (PU): manfaat aplikasi bagi pencatatan, rekap, dan laporan.
2. Perceived Ease of Use (PEOU): kemudahan dipelajari, dipahami, dan dioperasikan.
3. Fasilitas pendukung (FC): perangkat, jaringan, dukungan admin/mitra.
4. Pengaruh sosial (SI): dukungan ketua takmir, sesama pengurus, dan DMI.
5. Kepercayaan & keamanan siber (TR/CS): keyakinan data aman, akses terkendali, risiko kebocoran.
6. Persepsi transparansi & akuntabilitas (TA): aplikasi membantu laporan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Behavioral intention to adopt (BI): niat menggunakan/melanjutkan penggunaan aplikasi.

Selain itu dicatat karakteristik responden (peran, usia/kelompok usia, pengalaman penggunaan smartphone, dan pengalaman aplikasi serupa) untuk mengidentifikasi hambatan adopsi pada kelompok usia lanjut.

Teknik Analisis

Data dianalisis secara deskriptif menggunakan rerata (mean) dan simpangan baku (SD), serta persentase kategori (rendah–sedang–tinggi) untuk setiap konstruk. Temuan lapangan dari FGD dan pendampingan diringkas secara tematik untuk menjelaskan faktor penghambat/pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama DMI Bantul dan pengurus masjid lokus untuk menyepakati jadwal, output, serta mekanisme pelaksanaan. Hasil survei awal menunjukkan variasi pencatatan: sebagian menggunakan buku kas manual, sebagian menggunakan catatan sederhana, dan sebagian belum memiliki format laporan periodik yang konsisten. Temuan ini menguatkan perlunya standar SOP minimal dan alat bantu yang mudah digunakan.



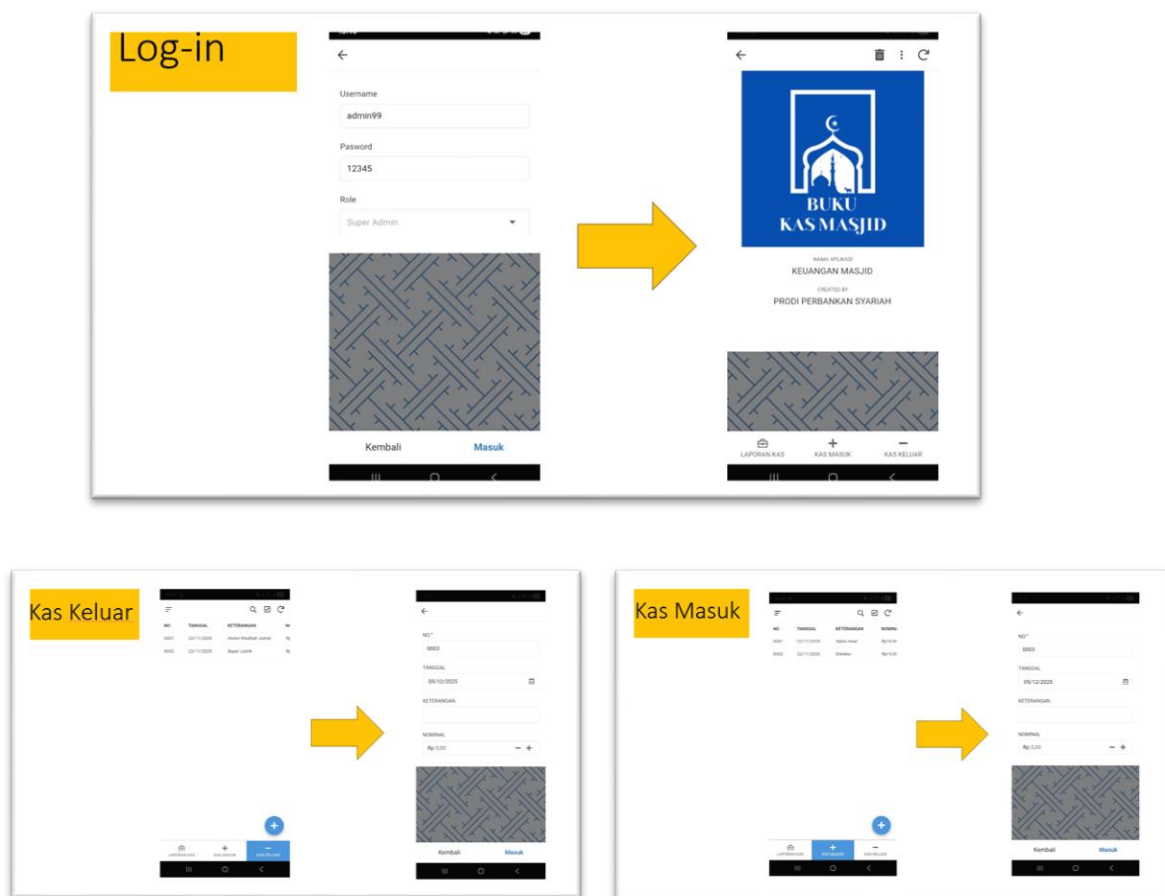
(Gambar 1. Koordinasi dan FGD pemetaan kebutuhan)

Pengembangan buku panduan dan Aplikasi AppSheet

Berdasarkan asesmen, disusun buku panduan tata kelola keuangan masjid meliputi: (1) prosedur kas masuk, (2) prosedur kas keluar dan otorisasi, (3) klasifikasi kategori transaksi, (4) rekap dan pelaporan periodik, (5) pengarsipan bukti transaksi, (6) backup data, dan (7)

mekanisme pergantian pengurus. buku panduan ini bertujuan menjaga konsistensi dan mengurangi ketergantungan pada satu individu.

Aplikasi AppSheet dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan pencatatan kas masuk-keluar serta rekap periodik. Aplikasi disederhanakan dengan form input yang jelas, pilihan kategori transaksi, dan tampilan ringkasan saldo. Kontrol akses diatur secara bertahap (mis. admin/bendahara vs pengurus lain) sesuai kapasitas masjid.



(Gambar 2. Tampilan aplikasi AppSheet: menu kas masuk, kas keluar, rekap laporan)

Pelatihan dan Distribusi Buku Panduan

Pelatihan dilaksanakan dengan fokus pada praktik: peserta diminta memasukkan transaksi contoh dan menghasilkan rekap laporan. Untuk meningkatkan keberlanjutan, tim

menyusun dan membagikan buku panduan pengguna yang berisi langkah-langkah operasional: login/akses, input kas masuk, input kas keluar, unggah bukti (bila diterapkan), rekap bulanan, serta mekanisme backup.



(Gambar 3. Pelatihan penggunaan aplikasi dan penyerahan buku panduan)

Hasil Evaluasi Penerimaan Teknologi

Evaluasi penerimaan teknologi dilakukan menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 yang mencakup tujuh konstruk, yaitu Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEOU), Fasilitas Pendukung (FC), Pengaruh Sosial (SI), Kepercayaan & Keamanan Siber (TR/CS), Persepsi Transparansi & Akuntabilitas (TA), serta Behavioral Intention to Adopt (BI). Seluruh variabel memiliki jumlah responden yang sama ($N = 78$) dan tidak ditemukan data hilang (missing = 0), sehingga hasil deskriptif dapat diinterpretasikan sebagai gambaran utuh dari peserta evaluasi.

Secara umum, output statistik menunjukkan bahwa persepsi responden berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, ditandai oleh nilai rerata (mean) yang terkonsentrasi pada kisaran 3,8974–4,3878. Selain itu, median hampir seluruh konstruk berada pada 4,00 (setara “setuju”), sementara mode mayoritas 4; satu pengecualian penting adalah konstruk TA yang memiliki mode 5, mengindikasikan bahwa penilaian “sangat setuju” paling sering muncul pada

aspek transparansi dan akuntabilitas. Pola mean–median–mode ini memperkuat kesimpulan bahwa peserta secara dominan menerima intervensi aplikasi dan BUKU PANDUAN sebagai solusi yang relevan dan bermanfaat.

Konstruk dengan penerimaan paling kuat adalah Persepsi Transparansi & Akuntabilitas (TA) dengan rerata 4,3878 dan median 4,2500. Temuan ini menandakan bahwa responden merasakan perubahan yang nyata pada kejelasan pelaporan, keterlacakan transaksi, dan kemudahan pertanggungjawaban kepada internal pengurus maupun jamaah. Penguatan tata kelola melalui BUKU PANDUAN yang dipadukan dengan aplikasi menjadi penjelasan substantif mengapa aspek TA tampil sebagai skor tertinggi. Kuartil atas (P75) TA yang mencapai 5,0000 menunjukkan bahwa seperempat responden teratas memberi penilaian maksimal—indikasi bahwa pada sebagian masjid, kebutuhan terhadap transparansi memang sangat mendesak sehingga solusi digital langsung dirasakan manfaatnya.

Selanjutnya, persepsi manfaat (PU) juga sangat tinggi (mean 4,3141; median 4,3750). Nilai median yang lebih tinggi dari 4 menunjukkan bahwa manfaat dirasakan bukan sekadar “cukup”, melainkan cenderung kuat—misalnya dalam mempercepat rekap kas, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memudahkan penyusunan laporan periodik. Tingginya PU merupakan sinyal positif karena dalam literatur penerimaan teknologi, persepsi manfaat umumnya menjadi pendorong utama terbentuknya niat adopsi.

Konstruk Fasilitas Pendukung (FC) memiliki mean 4,2051 (median 4,0000), menandakan bahwa sebagian besar peserta menilai dukungan perangkat, jaringan, serta bantuan teknis relatif memadai untuk menjalankan aplikasi. Temuan ini penting karena keberlanjutan adopsi pada organisasi komunitas sering terkendala bukan pada “niat”, tetapi pada kesiapan sarana dan mekanisme dukungan operasional.

Pada aspek risiko, Kepercayaan & Keamanan Siber (TR/CS) memperoleh mean 4,1699 (median 4,0000). Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terkait keamanan data, kontrol akses, atau kemungkinan penyalahgunaan relatif terkendali. Dalam konteks pengelolaan dana umat, trust/security bukan sekadar isu teknis, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial; karenanya skor TR/CS yang tinggi menjadi fondasi penting agar pengurus berani beralih dari pencatatan manual ke sistem digital.

Sementara itu, variabel outcome Behavioral Intention to Adopt (BI) berada pada kategori sangat tinggi (mean 4,0417; median 4,0000). Artinya, setelah pelatihan dan pendampingan, mayoritas peserta menunjukkan niat untuk melanjutkan penggunaan aplikasi. Namun, temuan deskriptif juga mengindikasikan bahwa niat adopsi belum sepenuhnya homogen, terlihat dari nilai minimum BI = 2 dan simpangan baku BI yang relatif lebih besar.

Dua konstruk yang nilainya relatif paling rendah (meskipun masih tinggi) adalah Perceived Ease of Use (PEOU) dan Pengaruh Sosial (SI). PEOU memiliki mean terendah (3,8974) dengan minimum 2, yang mengindikasikan adanya sebagian peserta—terutama kelompok usia lanjut—yang masih merasakan friksi operasional pada tahap awal (memahami menu, alur input, atau istilah). Kondisi ini penting karena kemudahan penggunaan berperan sebagai “pengurang hambatan” (friction reducer). Ketika manfaat (PU) dan tata kelola (TA) sudah sangat kuat, adopsi tetap mungkin terjadi, tetapi keberlanjutan dapat lebih rentan jika aspek kemudahan tidak diperkuat melalui pendampingan berulang dan penyederhanaan alur.

Pengaruh sosial (SI) memiliki mean 3,9519 dan juga minimum 2, menunjukkan bahwa dukungan lingkungan (ketua takmir, pengurus lain, DMI, atau figur rujukan) cukup terasa tetapi bervariasi antar masjid. Pada beberapa masjid, dorongan pimpinan dan kultur organisasi

mampu mempercepat penggunaan; pada masjid lain, penggunaan masih bergantung pada inisiatif individu bendahara/sekretaris.

Untuk memberi gambaran ringkas, Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik inti tiap konstruk.

Tabel 1. Ringkasan statistik deskriptif penerimaan teknologi

Konstruk	Mean	SD	Median	Mode	Min–Max
Perceived Usefulness (PU)	4,31	0,56	4,38	4	3–5
Perceived Ease of Use (PEOU)	3,90	0,65	4,00	4	2–5
Fasilitas Pendukung (FC)	4,21	0,50	4,00	4	3–5
Pengaruh Sosial (SI)	3,95	0,72	4,00	4	2–5
Kepercayaan & Keamanan Siber (TR/CS)	4,17	0,56	4,00	4	3–5

Dari sisi konsistensi jawaban, simpangan baku menunjukkan variasi rendah–sedang (0,50–0,72). Responden paling “kompak” pada FC (SD 0,50282) dan TA (SD 0,52479), menandakan persepsi dukungan fasilitas dan peningkatan transparansi relatif disepakati bersama. Variasi terbesar muncul pada SI (SD 0,71856) dan BI (SD 0,71443), mengindikasikan heterogenitas dorongan sosial dan kesiapan adopsi antar responden/masjid.

Pembahasan

Temuan kegiatan ini memperlihatkan bahwa penerimaan teknologi pada organisasi komunitas seperti masjid tidak cukup dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi persepsi manfaat, kemudahan, dukungan lingkungan, serta legitimasi tata kelola. Dari sisi persepsi manfaat (PU) yang sangat tinggi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi AppSheet—ketika dipadukan dengan SOP—berhasil menjawab kebutuhan paling mendasar pengurus: rekap kas menjadi lebih cepat, saldo dapat dipantau, dan laporan periodik lebih mudah disusun. Dalam kerangka TAM/UTAUT, PU merupakan prediktor kunci niat penggunaan; pada konteks masjid, manfaat tersebut tidak hanya berupa efisiensi kerja, tetapi juga mengurangi beban psikologis bendahara karena pencatatan menjadi lebih rapi dan mudah ditelusuri.

Konstruksi yang paling kuat muncul pada transparansi dan akuntabilitas (TA), yang menunjukkan bahwa intervensi ini dipersepsikan memperbaiki kualitas pertanggungjawaban dana umat. Hal ini penting karena pada lembaga keagamaan berbasis kepercayaan, akuntabilitas bukan sekadar memenuhi standar administrasi, namun menjadi fondasi legitimasi sosial. Ketika transaksi dapat direkap secara konsisten dan informasi lebih mudah dibagikan, potensi konflik internal, kecurigaan jamaah, dan ketergantungan pada satu individu dapat ditekan. Dengan demikian, TA yang tinggi dapat dibaca sebagai “nilai tambah sosial” dari digitalisasi keuangan masjid: bukan hanya memperbaiki proses, tetapi memperkuat kepercayaan kolektif.

Temuan kepercayaan dan keamanan siber (TR/CS) yang juga tinggi menegaskan bahwa responden relatif nyaman dengan aspek risiko, meskipun kekhawatiran praktis tetap ada. Pada konteks masjid, isu keamanan sering dipahami sebagai keamanan akses (siapa yang boleh input/lihat) dan keamanan keberlanjutan data (bagaimana jika ponsel hilang atau pengurus berganti). Karena itu, penerapan kontrol akses berbasis peran, prosedur backup, serta pencatatan bukti transaksi menjadi bagian dari “keamanan sosial-teknis” yang memperkuat kepercayaan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penguatan tata kelola (SOP) dan pengaturan akses pada aplikasi merupakan komponen penting untuk menjaga trust, bukan sekadar fitur tambahan.

Di sisi lain, kemudahan penggunaan (PEOU) menjadi aspek yang paling membutuhkan perhatian. Walaupun masih tinggi, nilai PEOU yang relatif lebih rendah dan adanya respon minimum menunjukkan bahwa friksi penggunaan nyata dialami oleh sebagian peserta, terutama pengurus usia lanjut. Secara implementatif, ini berarti keberhasilan program tidak boleh berhenti pada pelatihan satu kali. Diperlukan desain pembelajaran yang lebih adaptif seperti micro-coaching berulang, tutor sebaya, dan modul panduan yang sangat visual. PEOU

yang belum optimal juga menjelaskan mengapa niat adopsi (BI), meskipun tinggi, tetap menunjukkan variasi: kelompok yang merasa mudah akan cepat mengadopsi, sedangkan kelompok yang mengalami friksi cenderung menunda atau bergantung pada bantuan orang lain.

Variasi pada pengaruh sosial (SI) memperlihatkan bahwa konteks organisasi masjid berbeda-beda. Pada masjid dengan dukungan ketua takmir yang kuat, norma dan dorongan internal mempercepat penggunaan dan menjadikan aplikasi sebagai standar kerja baru. Sebaliknya, pada masjid yang dukungannya sosialnya lemah atau struktur kerjanya informal, penggunaan lebih rentan kembali ke kebiasaan lama. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan manajemen perubahan: selain melatih individu, program perlu memastikan adanya komitmen pimpinan, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme evaluasi rutin.

Secara keseluruhan, integrasi SOP + aplikasi + buku panduan + pendampingan terbukti relevan untuk organisasi komunitas karena menggabungkan pembinaan kelembagaan (standarisasi proses) dengan penguatan kapasitas (literasi digital). Model ini juga relatif mudah direplikasi melalui DMI: DMI dapat berperan sebagai fasilitator standarisasi SOP, pelatih (trainer) untuk batch berikutnya, serta pengelola klinik pendampingan untuk masjid yang membutuhkan dukungan lanjutan. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi keuangan masjid tidak hanya menghasilkan output teknologi, tetapi mendorong perubahan praktik tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

Kesenjangan Literasi Digital dan Faktor Usia

Hasil kuantitatif di atas konsisten dengan catatan pendampingan. Kelompok pengurus yang lebih muda atau yang terbiasa menggunakan smartphone umumnya cepat beradaptasi, sedangkan sebagian pengurus usia lanjut membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami

alur penggunaan. Kesulitan yang paling sering muncul adalah kebingungan memilih menu, ragu saat menekan tombol simpan, dan kekhawatiran “salah input” yang kemudian memengaruhi persepsi kemudahan (PEOU) dan pada beberapa kasus menahan niat adopsi (BI).

Dalam praktik pendampingan, strategi yang paling efektif untuk mengurangi friksi tersebut adalah micro-coaching (pendampingan singkat namun berulang), tutor sebaya (pengurus yang lebih muda membantu pengurus lansia), serta penyederhanaan kategori transaksi agar proses input tidak membingungkan. Buku panduan dengan ilustrasi langkah demi langkah juga berperan sebagai “alat bantu mandiri” setelah pelatihan selesai.

Isu Teknis sekaligus Legitimasi Sosial

Walaupun skor TR/CS tinggi, beberapa pengurus tetap mengangkat kekhawatiran praktis seperti kehilangan perangkat, salah pemberian akses, atau data tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, penguatan keamanan diarahkan pada penerapan kontrol akses berbasis peran (role), pembiasaan prosedur pergantian kata sandi, serta backup data berkala. Dalam konteks masjid, keamanan siber tidak hanya dipahami sebagai perlindungan sistem, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga legitimasi sosial: semakin jelas SOP, akses, dan jejak transaksi, semakin kuat kepercayaan internal sekaligus persepsi akuntabilitas. .

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan paket pendampingan tata kelola keuangan masjid berbasis AppSheet yang mencakup SOP, aplikasi, buku panduan, pelatihan, dan pendampingan implementasi. Evaluasi penerimaan teknologi menunjukkan persepsi responden berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi; aspek transparansi dan akuntabilitas (TA) menjadi kekuatan paling menonjol, diikuti manfaat (PU), dukungan fasilitas (FC), serta kepercayaan dan keamanan siber (TR/CS). Niat adopsi (BI) tergolong sangat tinggi, tetapi masih bervariasi, terutama dipengaruhi oleh friksi pada kemudahan penggunaan (PEOU) dan perbedaan dukungan sosial (SI).

Untuk memastikan keberlanjutan, kegiatan merekomendasikan: (1) micro-coaching berulang khususnya bagi pengurus usia lanjut, (2) penunjukan PIC ganda (bendahara dan kader administrasi) untuk mengurangi ketergantungan individu, (3) penyederhanaan alur input serta kategori transaksi, dan (4) penerapan kontrol akses dan backup data berkala. Model ini layak direplikasi melalui DMI Bantul dengan skema pelatihan berjenjang dan klinik pendampingan agar tata kelola keuangan masjid semakin transparan dan akuntabel.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, DMI Kabupaten Bantul, pengurus masjid mitra, serta seluruh peserta pelatihan dan pendampingan yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Cokrohadisumarto, W. bin M. and Sari, Y.I., 2024. Mosque-Based Integrated Community Empowerment Model. *Islamic Social Finance*, 4(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.58968/isf.v4i1.372>.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Faizi, Kusumastuti, R.D., Kusuma, A.S., Widodo, P. and Levianto, J., 2024. Sosialisasi dan Edukasi Fintech Pembiayaan Syariah Bagi Pengurus Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN. *Communnity Development Journal*, 5(5), pp.9097–9100. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.35123>.
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51–90.
- Islamiyah, N. (2019). The financial management practice of mosque: Study case in Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–13.
- Mahat, M. A., Noor, M. M., Salleh, J. M., & Karim, M. S. (2024). Optimizing financial transparency and accountability in mosques: A case study approach in enhancing reporting practices. *Information Management and Business Review*, 16(4), 166–175.
- Mohamed, I. S., Ab Aziz, N. H., Masrek, M. N., & Mohd Daud, N. (2014). Mosque fund management: Issues on accountability and internal controls. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 145, 189–194.
- Nurcahyani, A. E., Purbowisanti, R., Rahmanto, D. N. A., & Zaman, S. (2025). The Path to Loyalty in Sharia Cooperatives: Interlinking Service Quality, Relationship Marketing, and Member Satisfaction. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 6(1), 102-122.

- Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the Technology Acceptance Model. *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 69–103.
- Sabarudin, D. and Purwadi, 2023. Ideologi Kebangsaan, Identitas Politik, dan Ekonomi Calon Presiden Prabowo Subianto dalam Program Best Results Fast 2024-2029. *Jurnal Kebangsaan RI*, 1(1). <https://doi.org/https://repository.ukri.ac.id/id/eprint/691>.
- Said, J., Mohamed, A., Mohd Sanusi, Z., & Syed Yusuf, S. N. (2013). Financial management practices in religious organizations: An empirical evidence of mosque in Malaysia. *International Business Research*, 6(7), 111–119.
- Sudaryati, D., Heriningsih, S., Novianti, D., Agristya, N. N., & Salsabillah, N. (2025). Improving financial transparency in nonprofit organizations: A digital-based financial management model for mosques. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 52(2), 440–448.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Wahyuningsih, S., Hutagalung, D., Sutono, I., & Fahana, A. (2025). Peluang dan tantangan digitalisasi manajemen masjid: Tinjauan pustaka. *TATHO: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(3), 245–259.